



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1950  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Djawa Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat** : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 6 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948;

Dengan Persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan Pembentukan Propinsi Djawa Tengah dengan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN  
PROPINSI DJAWA TENGAH**

**BAB I.  
KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1.

- (1) Daerah yang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Tengah.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Tengah berkedudukan di kota Semarang.
- (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah terdiri dari 72 orang anggota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
- (3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

## **BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI DJAWA TENGAH.**

### Pasal 4.

- (1) Urusan Rumah Tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Tengah adalah sebagai berikut:
  - I. Urusan Umum.
  - II. Urusan Pemerintahan Umum.
  - III. Urusan Agraria.
  - IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung
  - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
  - VI. Urusan Kehewan.
  - VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian.
  - VIII. Urusan Perburuhan.
  - IX. Urusan Sosial.
  - X. Urusan Pembagian (distribusi).
  - XI. Urusan Penerangan.
  - XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudayaan.
  - XIII. Urusan Kesehatan.
  - XIV. Urusan Perusahaan.
- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan, urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadajiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa Tengah, ditambah.

### Pasal 5

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Djawa Tengah, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.
- (2) Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi tanggungan pemerintah pusat.

### Pasal 6.

Peraturan -peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Tengah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**BAB III.  
KETENTUAN PENUTUP.**

**Pasal 7.**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta  
Pada tanggal 4 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,  
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,  
A.G. PRINGGODIGDO